

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Permasalahan pengungsi ini diakibatkan oleh konflik yang terjadi di suatu negara.<sup>1</sup> Menurut Konvensi Pengungsi 1951, pengertian dari pengungsi yaitu *“Someone who is unable or unwilling to return to their country of origin owing to a well-founded fear of being prosecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion”*.<sup>2</sup>

Menurut Refugee Council of Australia jumlah pengungsi di tahun 2013 merupakan yang tertinggi sejak Perang Dunia II yaitu berjumlah 51.2 juta orang dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2017 yang mencapai 68.5 juta orang.<sup>3</sup> Peningkatan jumlah ini sendiri diakibatkan oleh berbagai konflik yang muncul selama beberapa tahun belakangan, seperti konflik Suriah, Palestina, Afrika Tengah, dan Sudan Selatan.<sup>4</sup> Hal inilah kemudian yang

---

<sup>1</sup> Adirini Pujayanti, “Isu Pencari Suaka dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. VI, No.04 (2014) : 2

<sup>2</sup> Text Document of Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees with an Introductory Note by the Officer of the United Nations High Commissioner for Refugees

<sup>3</sup> Refugee Council of Australia, “Global refugee numbers”, diakses 21 Juli, 2020, <https://www.refugeecouncil.org.au/getfacts/statistics/intl/global-trends/>

<sup>4</sup> BBC, “Pengungsi global capai jumlah tertinggi”, diakses 26 Juli, 2020, [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/06/140620\\_pengungsi\\_pbb](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/06/140620_pengungsi_pbb)

membuat para masyarakat tersebut keluar dari negara asalnya dan mencari negara yang lebih aman untuk bertahan hidup.<sup>5</sup>

Australia merupakan salah satu negara yang menerima hukum internasional dan telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 tentang status pengungsi.<sup>6</sup> Ketentuan tersebut menjadikan Australia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlakuan melindungi terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayahnya, hal tersebut jugalah yang memperkuat para pencari suaka untuk beremigrasi ke Australia.<sup>7</sup> Pencari suaka yang ke Australia kebanyakan datang dengan menggunakan jalur laut yaitu dengan perahu.<sup>8</sup> Pemerintah Australia pada tahun 2013 melalui *Department Immigration and Citizenship* (DIAC) menyatakan bahwa pencari suaka yang datang menggunakan perahu tersebut sebagai *Irregular Maritime Arrivals* (IMA). Hal ini mengacu kepada pengungsi yang berupaya untuk masuk ke Australia melalui jalur laut dan dianggap Australia sebagai pengungsi ilegal.<sup>9</sup>

Berdasarkan data UNHCR, lonjakan pengungsi pada masa Abbott terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 36.917 pengungsi serta lonjakan pencari suaka pada tahun 2013 dengan jumlah 11.549.<sup>10</sup> Peningkatan jumlah yang signifikan tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran akan keamanan negara yang akan terancam

---

<sup>5</sup> Ninin ernawati, “konsekuensi hukum penerapan dua kebijakan australia selaku anggota konvensi pengungsi tahun 1951 di tinjau dari konvensi wina 1969”, Jurnal Ius, Volume 7 No. 1, April 2019

<sup>6</sup> Andhika Bayu Prastya, “Factors Affecting the Policy of Australia Dealing on Illegal Immigrant on Australia Labor Party’s Era”, dalam Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember, VOL. XII(1): 1-15

<sup>7</sup> Herlina yosepina sihombing, “Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott”, Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 4, (2019) : 599-608

<sup>8</sup> Andhika Bayu Prastya.

<sup>9</sup> Teddy nurcahyawan, Permintaan maaf Australia terhadap prinsip Non Refoulement (studi kasus Sri Lanka), Era Hukum, Vol.2, No.1, juni 2017.

<sup>10</sup> <http://www.unhcr.org/>

akibat masuknya para pengungsi secara masif. Semakin meningkatnya pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia membuat pemerintah Australia merasa terancam.<sup>11</sup> IMAs sendiri berkaitan erat dengan penyelundupan manusia, sehingga keadaan ini membahayakan bagi stabilitas keamanan wilayah Australia.<sup>12</sup> Dalam permasalahan ini, berbagai upaya dilakukan Australia untuk mencegah pengungsi yang melakukan berbagai cara serta alasan untuk dapat menetap di Australia.<sup>13</sup>

Pada tanggal 18 September 2013 pasca terpilihnya Tony Abbott sebagai perdana menteri, Australia mengeluarkan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB).<sup>14</sup> Tony Abbot membuat kebijakan ini sebagai strategi dalam operasi penjagaan keamanan perbatasan yang dipimpin oleh militer serta didukung dan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintah federal. Kebijakan OSB merupakan respon Australia di bawah pemerintahan Abbott dalam memerangi kejahatan transnasional yaitu penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Kebijakan yang dipimpin langsung oleh militer Australia ini bertujuan untuk menghentikan kapal ilegal mencapai Australia dengan perahu.<sup>15</sup> Kebijakan OSB diterapkan karena pemerintahan koalisi menekankan bahwa Australia sedang dalam situasi *national emergency* disebabkan krisis perlindungan perbatasan akibat IMA

---

<sup>11</sup> Anggriawan, Danang Fery, “Pelanggaran Prinsip Non-Refoulment terhadap pengungsi dan pencari suaka pada kebijakan Operation Sovereign Borders serta implikasinya bagi Indonesia sebagai negara transit.” *Journal Of International Relations*, volume 2, nomor 4, (2016): 253, diakses 3 Agustus, 2020

<sup>12</sup> Department of Parliamentary Service, 2013

<sup>13</sup> Asylum Seeker Resource Center, “Operation Sovereign Borders”, diakses 25 Juli 2020 <https://www.asrc.org.au/wp-content/uploads/2013/07/Operation-Sovereign-Borders-May2014.pdf>

<sup>14</sup> Anggriawan, Danang Fery, “Pelanggaran Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi...”, 251

<sup>15</sup>Asylum Seeker Resource Center, “Operation Sovereign Borders”, diakses 25 Juli, 2020 <https://www.asrc.org.au/wp-content/uploads/2013/07/Operation-Sovereign-Borders-May-2014.pdf>

yang terus berdatangan.<sup>16</sup> Kebijakan OSB tersebut menjadi salah satu perubahan yang paling signifikan di tahun 2013.<sup>17</sup>

Pada tahun 2015 Perdana Menteri Australia Tony Abbot mempertegas kebijakan ini melalui pernyataan terkait penolakan pengungsi. Abbot menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

*..to do the right thing by our people and ultimately do the right thing by poor, misguided people who for all sorts of reasons want a better life but very often end up dead if they succumb to the lure of the people-smugglers. There is a lesson in what's happened here in Australia for other countries. Quite obviously there is a lesson here.*

*..the great thing about Operation Sovereign Borders is that, in stopping the boats, we have stopped the deaths, if you want to keep life safe, you've got to keep the boats stopped.*

Pernyataan Tony Abbott ini dengan tegas menjelaskan bahwa kebijakan OSB merupakan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut. Penolakan dan pengembalian para pencari suaka adalah suatu tindakan yang harus diambil demi mencapai keamanan masing-masing, baik keamanan negara maupun keamanan pencari suaka dari resiko kecelakaan dan kematian di perjalanan.

---

<sup>16</sup> ABC news, "Prime Minister Tony Abbott likens campaign against people smugglers to 'war'", 4 Februari 2014, diakses 18 Juli, 2020, <http://www.abc.net.au/news/2014-01-10/abbott-likens-campaignagainst-people-smugglers-to-war/5193546>

<sup>17</sup> Rizka fiani prabaningtyas, "The Impact Of Australian Policy On Illegal Maritime Arrivals (Ima) Towards Current Relation Of Australia-Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 12, No. 1 (2015) : 70

<sup>18</sup> The Telegraph, "Tony Abbott claims EU 'in talks with Australia' over its success tackling migrant crisis", diakses 20 Juli, 2021,

<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/11581621/TonyAbbott-claims-EU-in-talks-with-Australia-over-its-success-tackling-migrant-crisis.html>,

Perdana Menteri Tony Abbott memang dikenal dengan pribadi yang tegas, dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya dirasa sangat masuk akal jika Abbott menerapkan kebijakan *Operation Sovereign Borders*.<sup>19</sup> Pribadi Abbott yang keras dan tegas juga terlihat dalam pidato-pidatonya mengenai IMAs di mana ia dengan keras menegaskan bahwa kebijakan OSB adalah suatu tindakan pencegahan yang memang harus dilakukan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut.<sup>20</sup>

Kebijakan OSB yang diberlakukan oleh Australia ini mendapat respon negatif dari berbagai pihak kemudian dikritik oleh dunia internasional karena Australia berarti tidak mematuhi Konvensi Pengungsi 1951 yang telah ditandatangani oleh Australia.<sup>21</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengemukakan keras kebijakan OSB Australia yang menyebutkan bahwa Australia telah melanggar konvensi serta melanggar Hak Asasi Manusia.<sup>22</sup> Kebijakan OSB pada pemerintahan Abbott tidak hanya dikecam oleh dunia internasional akan tetapi juga dikecam oleh masyarakat Australia sendiri. Daniel Webb yang merupakan *Direktur Human Rights Law Centre* di Australia juga mengemukakan Australia telah melakukan praktik kejam terhadap pengungsi.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Tanzalia E, "Motivasi Australia Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi terhadap Irregular Maritime Arrivals (IMAs) tahun 2001-2008", JOM FISIP, Vol. 2 No. 2 Oktober 2014.

<sup>20</sup> The Telegraph, "Tony Abbott claims EU 'in talks with Australia' over its success tackling migrant crisis", diakses 20 Agustus 2020

<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/11581621/Tony-Abbott-claims-EU-in-talks-with-Australia-over-its-success-tackling-migrant-crisis.html>

<sup>21</sup> Sian Troath, "Prospects for Australian-Led Regional Cooperation On Asylum Seeker and Refugee Issues", *Andalas Journal of International Studies*, Vol 5 No. 2, (2014): 113

<sup>22</sup> BBC, "Australia: Manusia perahu 'tak akan pernah' dapat visa", diakses 27 September 2020

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/08/130817\\_tonyburke\\_suaka](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130817_tonyburke_suaka)

<sup>23</sup> Deutsche Welle, "kebijakan pengungsi australia tuai kecaman", dalam VOA, 19 Juli 2018, diakses 20 September 2020

Melihat penjelasan di atas, terlihat bahwa Tony Abbott berperan sangat penting dalam penetapan kebijakan *Operation Sovereign Borders*. Pilihan Abbott untuk tetap menjalankan *Operation Sovereign Borders* dengan mengabaikan respon negatif dari berbagai pihak mengindikasikan bahwa PM Tony Abbott memiliki persepsi ancaman dalam penerbitan kebijakan tersebut. Sehingga penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi agar dapat mengetahui fakta-fakta terkait penetapan kebijakan *Operation Sovereign Borders*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Semakin meningkatnya pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia membuat pemerintah Australia merasa terancam. Dalam penanganan hal tersebut, berbagai upaya dilakukan Australia untuk mencegah pengungsi yang melakukan berbagai cara serta alasan untuk dapat menetap di Australia. Pada tahun 2013 Australia di bawah pemerintahan Tony Abbott mengeluarkan dan menjalankan kebijakan *Operation Sovereign Border* (OSB). Kebijakan OSB ini jelas telah melanggar prinsip *non refoulement*, yang merupakan prinsip terpenting dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Tindakan Australia tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, baik eksternal maupun internal Australia. Pengabaian protes tersebut menunjukkan indikasi bahwa Abbott memiliki persepsi ancaman tersendiri dalam penerapan *Operation Sovereign Border*. Oleh sebab itu, persepsi ancaman Tony Abbott terkait keputusannya menerapkan *Operation Sovereign Border* menjadi suatu hal menarik untuk diteliti.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti yaitu “Bagaimana persepsi ancaman

Tony Abbott yang melatarbelakangi penetapan dan pemberlakuan kebijakan *Operation Sovereign Borders* di Australia ?”.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi ancaman Tony Abbott sebagai aktor dominan dalam penetapan kebijakan *Operation Sovereign Borders* di Australia.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menambah kepustakaan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan Isu Pengungsi melalui kebijakan *Operation Sovereign Borders* pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott
- 2) Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang sama.

#### 1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis penelitian, peneliti berupaya untuk menghimpun informasi sebanyak mungkin yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti telah mengumpulkan berbagai karya tulis ilmiah sebagai acuan bagi peneliti dalam memecahkan anomali dalam penelitian ini. Adapun beberapa karya tulis yang peneliti jadikan rujukan antara lain sebagai berikut :

Pertama, peneliti merujuk pada jurnal yang berjudul *Deliberation And Resecuritization : Australia, Asylum-Seekers And The Normative Limits Of The Copenhagen School*, dipublikasikan oleh *Australia Journal of Political Science*

yang ditulis oleh McDonald.<sup>24</sup> Jurnal ini berisi mengenai bagaimana pandangan para pemimpin Australia terhadap isu pengungsi dan bagaimana solusi terhadap isu tersebut. Menurut Donald para pemimpin Australia telah sepakat bahwasanya isu pengungsi adalah permasalahan besar yang akan mengancam kedaulatan bahkan masyarakat Australia. Secara garis besar para pemimpin di dalam pemerintahan Australia menganggap pengungsi akan menimbulkan beberapa dampak besar seperti: masuknya teroris, ancaman populasi, terganggunya gaya hidup Australia dan ancaman kedaulatan Australia.

Tinjauan pustaka kedua yaitu tulisan Adirini Pujayanti yang berjudul Isu Pengungsi Global dan Kebijakan Australia tahun 2015.<sup>25</sup> Pada tulisannya, Adirini Pujayanti menjabarkan keadaan pemerintah Australia di bawah PM Tony Abbot yang kewalahan menghadapi meningkatnya kedatangan para pencari suaka. Keadaan tersebut yang menjadi alasan Australia dengan PM Tony Abbot menerapkan strategi prefentif dengan mengeluarkan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) untuk mencegah masuknya para pencari suaka ke negaranya. Pada jurnal ini juga sedikit menjelaskan mengenai dinamika politik yang terjadi di Australia serta isu penyuapan yang melanda pemerintah Australia di bawah PM Tony Abbott. Masalah para pencari suaka ini telah menjadi isu politik di Australia. Pemerintahan PM Tony Abbott berada di bawah tekanan kuat parlemen karena dianggap menggunakan uang wajib pajak yang justru dibutuhkan untuk hal-hal lain. Sejauh ini Perdana Menteri Tony Abbott secara konsisten tidak

---

<sup>24</sup> Mc Donald. *Deliberation And Resecuritization : Australia, Asylum-Seekers And The Normative Limits Of The Copenhagen School*: 2011

<sup>25</sup> Adirini Pujayanti, "Isu Pencari Suaka dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia", dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. VI, No.04: 2014

mengomentari rincian operasional di lapangan karena hal itu terkait keamanan operasional.

Kebijakan OSB tersebut termasuk pengiriman pencari suaka yang ada di Australia ke sejumlah kamp detensi di Kepulauan Manus dan Nauru di Papua Nugini. Angkatan Laut Australia dengan tegas mencegah perahu pencari suaka yang masuk di sekitar Christmast Island, sejak diberlakukannya kebijakan tersebut hanya ada satu perahu pencari suaka yang berhasil berlabuh ke daratan Australia sejak Desember 2013. Pada tanggal 25 Mei 2015, Angkatan Laut Australia diduga membayar enam awak perahu asal Indonesia anggota sindikat penyelundupan manusia di perairan internasional untuk membawa 65 imigran gelap asal Bangladesh, Srilanka dan Myanmar untuk kembali ke Indonesia. Australia membayar USD 6.000 untuk nahkoda dan USD 5.000 untuk awak kapalnya hingga total uang yang diberikan adalah USD 31.000. Selain memberikan uang, pihak angkatan laut Australia juga memberikan bantuan berupa sarana logistik, bahan bakar, jaket penyelamat, dan dua perahu kayu yang mengarah ke Pulau Rote, NTT. Temuan utama dari jurnal ini adalah kebijakan pragmatis yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott berupa *Operation Sovereign Border* sini cenderung menimbulkan respon negatif dan polemik di kalangan elit serta masyarakat Australia.

Studi pustaka ketiga yang digunakan yaitu jurnal yang diterbitkan oleh *journal of international relations*, yang merupakan karya Danang Fery Anggriawan yang berjudul pelanggaran prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi dan pencari suaka pada kebijakan *operation sovereign borders* serta implikasinya bagi

Indonesia sebagai negara transit.<sup>26</sup> Dalam jurnal dijabarkan mengenai Kebijakan OSB yang memiliki tujuan utama untuk menghentikan kedatangan IMA dan memberantas praktik penyelundupan manusia ke Australia. Namun dalam implementasinya, kebijakan tersebut berpotensi membawa kerugian bagi negara transit yang digunakan sebagai pola pergerakan pengungsi dan pencari suaka dengan tujuan Australia. Indonesia diketahui menjadi negara transit utama dalam pola pergerakan IMA ke Australia. Dampak yang mungkin timbul dari implementasi kebijakan OSB bagi Indonesia adalah terkait dengan beban pengelolaan pengungsi dan pencari suaka. Implementasi kebijakan OSB juga berpotensi kuat melanggar prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional melalui praktik pengembalian perahu ke wilayah asal mereka berlayar. Penerapan kebijakan OSB menunjukkan adanya keinginan dari Australia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya terkait dengan isu pengungsi dan pencari suaka.

Studi pustaka keempat yaitu jurnal yang ditulis Fakhru Rizal Razak, yang berjudul kebijakan unilateral penanganan imigran ilegal Australia pasca pemilihan umum Australia tahun 2013.<sup>27</sup> Jurnal ini menganalisis terkait keputusan menggunakan kebijakan militer untuk penanganan isu imigran ilegal di Australia pasca pemilihan umum tahun 2013. Pada jurnal tersebut dijelaskan perubahan kebijakan Australia terkait imigran ilegal pasca pemilu presiden 2013 dapat dipahami sebagai sebuah hasil sekuritisasi kembali isu ini dalam gelaran Pemilu presiden 2013. Temuan dari jurnal ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang

---

<sup>26</sup> Danang fery anggriawan, “pelanggaran prinsip non-refoulement terhadap pengungsi dan pencari suaka pada kebijakan operation sovereign borders serta implikasinya bagi Indonesia sebagai negara transit”, *Journal of international relations*, Volume 2, Nomor 4, (2016)

<sup>27</sup> Fakhru rizal razak, “kebijakan unilateral penanganan imigran ilegal Australia pasca pemilihan umum Australia tahun 2013”, *Jurnal Politik Internasional*, Vol. 20 No. 2 (137 -159)

dilakukan sejak masa kampanye hingga masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbot adalah untuk mengangkat isu imigran ilegal di Australia dalam agenda keamanan nasional Australia. Hal ini terkait kedaruratan isu imigran ilegal yang menjadi ancaman bagi Australia. Proses ini sudah dapat ditelusuri sejak koalisi Partai Liberal-Nasional melakukan *speech act* melalui retorika politik ‘*stop the boat*’ untuk menghambat arus kedatangan imigran ilegal sebagai bagian dari kampanye politiknya. Komponen *speech act* yang dilakukan oleh koalisi Partai Liberal-Nasional dalam kampanye jelang pemilu Australia 2013 menjadi sangat krusial untuk menjadikan isu kedatangan imigran ilegal sebagai ancaman keamanan nasional bagi Australia yang kemudian menghasilkan tindakan luar biasa melalui pengerahan kekuatan militer untuk menghadapi kedatangan imigran ilegal melalui OSB.

Studi pustaka kelima yaitu tulisan Ni Luh Made Aprilia Marisa dalam tulisannya yang berjudul “Dilema Pemerintah Australia dalam Implementasi Prinsip Good International Citizenship pada Kebijakan terkait Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Masa Pemerintahan Tony Abbott dan Malcolm Turnbull” menjelaskan terkait dilema kebijakan Australia terjadi pada aspek ideasional, di mana prinsip *good international citizen* cenderung lebih dekat dengan Partai Buruh berbeda dengan Partai Liberal memiliki cara berbeda dalam memahaminya. Dilema dan permasalahan ini berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah Australia terkait pengungsi dan pencari suaka. Tidak hanya itu, Australia bukannya mengubah kebijakannya sesuai dengan opini publik akan tetapi malah melakukan *issue framing*.

Berdasarkan lima rujukan tulisan di atas, peneliti ingin memberi batasan terkait kontribusi dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada artikel jurnal pertama hanya berfokus pada pandangan para pemimpin Australia terhadap isu pengungsi dan bagaimana solusi terhadap isu tersebut, di mana pemimpin di dalam pemerintahan Australia menganggap pengungsi akan menimbulkan beberapa dampak besar. Tulisan kedua membahas mengenai kebijakan pragmatis yang dikeluarkan oleh pemerintahan Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott berupa *Operation Sovereign Border* yang mana hal ini cenderung menimbulkan respon negatif dan polemik di kalangan elit serta masyarakat Australia.

Tulisan ketiga membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan OSB yang berpotensi kuat melanggar prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional melalui praktik pengembalian perahu ke wilayah asal mereka berlayar, di mana Indonesia sebagai negara transit utama dalam pola pergerakan IMAs ke Australia akan terkena dampak dari implementasi kebijakan OSB ini. Tulisan keempat membahas mengenai sekuritisasi yang dilakukan sejak masa kampanye hingga masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbot yaitu mengangkat isu imigran ilegal di Australia dalam agenda keamanan nasional Australia. Hal ini terkait dengan kedaruratan isu imigran ilegal yang menjadi ancaman bagi Australia. *Speech act* yang dilakukan Koalisi Partai Liberal-Nasional dalam kampanye jelang Pemilu Australia 2013 menjadi sangat krusial yaitu menghasilkan tindakan luar biasa melalui pengerahan kekuatan militer untuk menghadapi kedatangan imigran ilegal melalui OSB.

Tulisan kelima membahas mengenai dilema kebijakan Australia terjadi pada aspek ideasional, di mana prinsip *good international citizen* cenderung lebih dekat dengan Partai Buruh berbeda dengan Partai Liberal memiliki cara berbeda dalam memahaminya. Dilema dan permasalahan ini berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah Australia terkait pengungsi dan pencari suaka. Berdasarkan lima rujukan tulisan tersebut, belum ada yang membahas mengenai persepsi ancaman Tony Abbott sebagai PM Australia dalam penetapan kebijakan *Operation Sovereign Borders* terkait isu IMAs di Australia. Selain itu lima rujukan tulisan tersebut terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan sumber analisis bagi peneliti dan sebagai informasi tambahan bagi peneliti untuk melihat sudut pandang yang berbeda terkait isu yang dibahas.

## **1.7 Kerangka konseptual**

### **1.7.1 The Level of the Individual Decision-Maker**

Menurut Robert Jackson, ada banyak pengaruh serta hambatan dalam membuat kebijakan luar negeri. Hambatan dan batasan tersebut berhubungan dengan individu dalam memproses informasi. Setiap individu mengembangkan kepercayaan dan sudut pandang pribadinya terhadap lingkungan baik fisik maupun sosial. Kepercayaan ini berguna untuk mempermudah dan membentuk pandangan terhadap dunia luar.<sup>28</sup> Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, serta dimaksud untuk mencapai

---

<sup>28</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations Theories and Approaches*, (235)

tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>29</sup>

Menurut K.J Holsti, kebijakan luar negeri merupakan suatu gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungannya yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan negara lain.<sup>30</sup> Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kebijakan luar negeri merupakan strategi yang dilakukan oleh suatu negara melalui pembuat kebijakan berdasarkan kepentingan nasional negaranya yang dioperasikan dalam dinamika politik internasional untuk menghadapi entitas politik lainnya.<sup>31</sup>

Ada dua faktor determinan yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan peran pemimpin negara, pengaruh kelompok, politik domestik dan oposisi. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan internasional menjadi faktor tertentu dalam mempengaruhi kebijakan untuk bereaksi pada isu tersebut.<sup>32</sup> Para pemimpin nasional dapat membuat keputusan yang rasional untuk kepentingan nasional. Keputusan individu mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan dari pembuat keputusan. Pengambil keputusan individu tidak hanya memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda, tetapi juga memiliki kepribadian unik, pengalaman pribadi, kemampuan intelektual, serta gaya pribadi membuat keputusan, bagaimana psikologi individu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Proses kognitif

---

<sup>29</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin, (1999): 5

<sup>30</sup> K.J Holsti, Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis. Edisi Terjemahan, (1987): 107

<sup>31</sup> Jack C Plano, Roy Olton, The International Relations Disctionary 3rd Edition, (England: Clío Press Ltd,(1985): 5

<sup>32</sup> Valerie M.Hudson, "The History and Evolution of Foreign Policy Analysis," dalam ForeignPolicy: Theories; Actor; Case, ed. Steve Smith et al. (New York: Oxford University Press ( 2008) : 21

dan pendekatan psikologi juga memfokuskan pada pembuatan kebijakan, khusus kepada aspek psikologi pembuatan keputusan tersebut.<sup>33</sup>

Variabel individu pembuat kebijakan seperti kepala negara, khususnya mengenai kesan, persepsi dan karakteristik pribadinya yang menentukan corak politik luar negeri, menjelaskan bagaimana faktor-faktor internal individu kepala pemerintahan dapat memengaruhi perilaku dalam hal pembuatan kebijakan luar negeri.<sup>34</sup> Dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara, fokus utamanya adalah melihat peran pemimpin negara. Dengan menggunakan sudut pandang individu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana faktor individu PM Tony Abbott mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Pembuat kebijakan dalam sebuah negara memiliki makna khusus, selain sebagai panutan masyarakat, seorang pembuat kebijakan dapat bertindak sebagai eksekutor. Dengan menjadi seorang eksekutor, segala yang telah diputuskan dapat dijalankan.

Dalam membahas masalah persepsi ancaman yang dimiliki suatu negara, hal ini tidak terlepas dari paradigma yang dianut oleh pembuat keputusan.<sup>35</sup> Presiden dan agen-agen pemerintahan dalam negara berperan penting dalam membuat keputusan atau kebijakan. Paradigma seorang atau lembaga pembuat keputusan tersebut menentukan sifat dan esensi sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Dalam halnya dengan persepsi ancaman, paradigma seorang atau lembaga pembuat

---

<sup>33</sup> Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics* Princeton, New Jersey Princeton University Press (1976): 217

<sup>34</sup> James N. Rosenau *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York : Nichols Publishing Company, (1980): 252

<sup>35</sup> Ole R. Holsti, "The Belief System and National Images: A Case Study" dalam James N. Rosenau ed., 2004, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: Free Press, (1960): 25

keputusan ini berperan cukup signifikan.<sup>36</sup> Kebijakan luar negeri merupakan salah satu hasil dari suatu *decision making process*. Sehingga konsep *The Level of the Individual Decision-Maker* ini akan membantu peneliti untuk menjelaskan peran individu yang dalam hal ini PM Tony Abbott dalam membuat kebijakan *Operation Sovereign Borders* yang dipengaruhi oleh persepsi ancaman.

### 1.7.2 Persepsi Ancaman (Threat perception)

Persepsi mengandung arti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh individu tidak akan pernah dapat dipisahkan dari keyakinan dan kepercayaan individu tersebut dalam melihat dunia sekitarnya dan juga aktor lain yang berhubungan dengannya. Sehubungan dengan konsep ini, terdapat seorang ahli hubungan internasional bernama Daniel S. Papp yang berpendapat soal persepsi. Menurut Papp, persepsi adalah suatu cara pandang individu yang pembentukannya dipengaruhi oleh pengalaman pada masa lalu, ekspektasi masa kini, keinginan atau ketakutan yang dipengaruhi pihak lain serta faktor-faktor lainnya.<sup>37</sup> Jhon E Maroz mengartikan persepsi sebagai suatu pemahaman dan kesadaran diri terhadap peristiwa, situasi, atau proses. Pemahaman dan kesadaran diri ini pada dasarnya akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu hal.<sup>38</sup> Menurut ahli lainnya, yaitu Janies Gross Stein, persepsi merupakan proses menangkap secara indrawi, mengenali, serta memproses apa yang ditangkap.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Graham T Allison, dan Philip Zelikow, *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis*. Addison-Wesley Educational Publishers Inc (1999)

<sup>37</sup> Daniel S Paap, "Contemporary International Relation Framework for Understanding" (Second Edition), (New York Macmillan Publishing Company), (1998): 155

<sup>38</sup> Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, Analisis Konstruktivisme Tentang Persepsi Ancaman, *Jurnal Global dan Strategis*, Vol 7, No.1, (5)

<sup>39</sup> Janies Gross Stein. *Threat Perception in International Relations*. (Oxford : Oxford University Press) (2013): 1

Persepsi individu dipengaruhi keadaan emosional, pengolahan informasi, dan pola inferensi serta atribusi. Pada tingkat kolektif, proses persepsi lebih sulit untuk diidentifikasi. Pemahaman-pemahaman dan emosi saling dibagi dan dikomunikasikan guna menciptakan suasana kebersamaan. Dalam hal ini, ancaman dibangun secara sosial dalam dan di antara percakapan pribadi dan umum oleh para ahli, pemimpin politik, dan masyarakat umum.<sup>40</sup> Ancaman lahir dari persepsi yang melihat mereka sebagai ancaman, bisa kita lihat bahwa Tony Abbott dan pemerintahannya melihat bahwa pengungsi yang datang ke Australia sebagai suatu ancaman.

Janice Gross Stein dalam tulisannya membahas lima penjelasan non psikologis tentang persepsi ancaman dan menjelaskan bahwa para ahli dalam hubungan internasional telah mengidentifikasi dan kemudian menilai adanya suatu kontribusi psikologi yang membawa teori yang berbeda untuk menganalisis persepsi ancaman.<sup>41</sup>

### *1. Non-Psychological Explanations of Threat Perception*

Dari sudut pandang rasionalis, persepsi ancaman merupakan perspektif pemimpin dalam melihat potensi ancaman dan perang. Pemimpin memahami suatu ancaman berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Hal ini dikarenakan pemimpin memiliki perbedaan persepsi terhadap suatu fenomena yang terjadi dan dipengaruhi oleh persepsi subjektifnya sendiri serta disebabkan oleh interpretasi sinyal atau tanda informasi yang keliru. Interpretasi sinyal yang keliru kerap menjadi pemicu

---

<sup>40</sup> C.O. Meyer, international terrorism as a force of homogenization? A constructivist approach to understanding cross-national threat perceptions and responses, *cambridge review of international affairs*, (2009): 647-666

<sup>41</sup> Janice Gross Stein, "Threat perception in International Relations...", 2103

perang, meningkatnya ketegangan di antara masing-masing negara, dan berbagai macam krisis lainnya. PM Tony Abbott dalam pengambilan kebijakan OSB tidak terlepas dari unsur subjektifnya dalam persepsi seorang individu memiliki kecurigaan yang berlebihan.

Kemudian, Stein menyebutkan ada lima penjelasan non psikologis yang membentuk persepsi ancaman. Pertama, *changing balances of power*, perubahan keseimbangan kekuasaan yang dirasakan oleh pemimpin mempengaruhi bagaimana pemimpin melihat ancaman. Hal ini bersifat sistemik dan dapat menciptakan insentif bagi pemimpin atau pengirim sinyal untuk menahan informasi pribadi yang mengakibatkan sulitnya penerima sinyal memahami persepsi ancaman. Pertanda atau sinyal dalam persepsi ancaman lebih ditentukan kepada pemimpin, dalam hal ini pemimpin negara yang memberikan sinyal komitmen, sinyalnya tidak bisa terjaga dengan baik atau tidak kredibel yang mengakibatkan kerancuan dan misinterpretasi oleh pemimpin negara yang menerima sinyal, hal ini berujung pada persepsi ancaman yang bias. Sinyal dan persepsi ancaman menjadi makin sulit dan kompleks ketika niat dari pemberian sinyal tersebut susah dipahami karena permasalahan keamanan.<sup>42</sup>

Kedua, status dilema, ini terjadi ketika seorang pemimpin baru akan puas terhadap status atau kedudukannya jika dia mengetahui informasi lengkap tentang pihak lainnya atau hal yang dianggapnya sebagai ancaman. Tanpa informasi yang lengkap, pemimpin akan merasa bahwa status atau kedudukannya sedang terancam, bahkan ketika sebenarnya tidak terancam. Oleh karena hal ini, pemimpin kemudian

---

<sup>42</sup> C.O. Meyer, international terrorism as a force of homogenization? A constructivist approach to understanding cross-national threat perceptions and responses, (Cambridge Review of International Affairs, 2009): 7

mengambil tindakan untuk menegaskan kedudukannya dari ancaman pihak lain. Ketiga, *structural attributes of the political system* menjelaskan bahwa organisasi dan birokrasi politik dapat menghasilkan patologi para pemimpin menghadapi ancaman dengan mengedepankan kepentingannya dan kepentingan institusionalnya.

Keempat, *sociocultural*, masyarakat domestik dan identitas yang menyertai pemimpin dapat berpengaruh terhadap bagaimana seorang pemimpin memandang sebuah ancaman. Selanjutnya, sosial budaya juga merupakan hal yang membentuk persepsi ancaman. Masyarakat domestik dan identitas yang menyertainya mempengaruhi bagaimana individu pembuat keputusan memandang sebuah ancaman. Ancaman itu dibesar-besarkan karena kepercayaan emosional, informasi yang tidak lengkap, dinamika kelembagaan, dan praktek budaya. Ancaman menjadi rutinitas budaya, tertanam dalam budaya lembaga-lembaga politik. Dengan kondisi tersebut, persepsi ancaman kolektif menjadi sangat kuat melawan perubahan.<sup>43</sup> Tradisi dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh PM Tony Abbott yang dapat mempengaruhi perilaku warga Australia. Terakhir, *the breaking of norms*, pelanggaran norma yang dilihat oleh pemimpin menjadi sinyal kritis yang meningkatkan persepsi ancaman pemimpin tersebut.<sup>44</sup>

## 2. Psychological Explanations of Threat Perception

Penjelasan rasionalis tentang persepsi ancaman dan perang perlu dilengkapi dengan penjelasan psikologis. Psikologi mempengaruhi persepsi ancaman dan

---

<sup>43</sup> C.O. Meyer, international terrorism as a force of homogenization?...", 8

<sup>44</sup> Janice Gross Stein, "Threat perception in International Relations, Forthcoming in *The Oxford Handbook of Political Psychology*", 2nd ed. Edited by Leonie Huddy, David O. Sears, and Jack S. Levy, Oxford University Press (2013)

pengambilan keputusan seorang pemimpin. Cara pandang, karakteristik, nilai atau ideologi yang melekat dalam pikiran pembuat kebijakan atau seorang pemimpin negara yang dapat mengerti suatu fenomena menjadi sebuah ancaman. Para ahli biasanya telah mengidentifikasi pola persepsi yang menyimpang dari rasionalitas dalam konteks krisis dan perang karena tidak memperhatikan untuk pengidentifikasian pola-pola persepsi ketika menilai suatu ancaman yang stabil dan rutin, atau ketika menilai ancaman namun tidak berujung pada kekerasan di mana peran psikologi lebih cenderung menjadi bagian dalam persepsi ancaman serta pengambilan keputusan.<sup>45</sup>

### 3. *Cognitive Biases and Heuristics*

Pemikiran dan heuristik digunakan untuk mengurai kompleksitas dan mengantisipasi ketidakpastian, mengendalikan informasi, membuat kesimpulan umum terkait persepsi ancaman. Reaksi terhadap ancaman lebih kepada reaksi yang bersifat antisipasi terhadap masa depan, atau ancaman yang ada di masa depan. Kadang individu, dalam hal ini termasuk staf eksekutif, pemimpin dan pengambil keputusan yang terlalu percaya diri terhadap potensi ancaman akan merasa sangat terancam dan kadang bereaksi berlebihan atau ketika mendapat ancaman yang keliru. Bias dalam pengambilan keputusan oleh pemimpin bersifat bereaksi berlebihan terhadap potensi ancaman.

#### 3.1 Kesederhanaan (*Simplicity*)

---

<sup>45</sup> C.O. Meyer, international terrorism as a force of homogenization?..., 10

Pemimpin politik mencoba menilai suatu ancaman yang kompleks menjadi lebih sederhana. Dalam melakukannya mereka secara tidak sadar menghilangkan konteks atau lika-liku permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>46</sup>

### **3.2 Konsistensi (*Consistency*)**

Psikolog kognitif menghasilkan bukti kuat bahwa orang-orang memiliki konsistensi yang mana mereka menyangkal dan mengabaikan informasi yang tidak konsisten untuk mempertahankan keyakinan mereka.

### **3.3 *Poor Estimators***

Para ahli cenderung lebih-lebihkan kemungkinan dari suatu ancaman sehingga terlihat besar dan mempersulit masalah.<sup>47</sup>

## **4. *Loss Aversion, Framing, and Risk Propensity***

Individu atau pemimpin menganggap suatu ancaman berdasarkan faktor risiko dan segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kebutuhan untuk kesederhanaan dan konsistensi, hambatan serta kesulitan terhadap pemikiran yang memiliki kemungkinan-kemungkinan, kecenderungan berkurangnya antipati, dan efek framing sering dianggap sebagai penyimpangan model rasional dari pencegahan. Ketahanan model psikologis sekarang didukung oleh generasi penelitian yang menetapkan pola-pola ini sebagai norma dan bukan pengecualian.

Teori prospek memiliki implikasi yang cukup besar untuk teori pencegahan yang rasional. Teori pencegahan didasarkan pada pilihan rasional, harapan bahwa

---

<sup>46</sup> Janice Gross Stein, "Threat perception in International Relations, (2013): 10

<sup>47</sup> Janice Gross Stein, "Threat perception in International Relations, (2013): 11

penangkal mengancam konsekuensi berbahaya yang akan melebihi manfaat dari apa yang ingin dilakukan oleh calon penantang. Framing merupakan salah satu alasan penyebab terjadinya bias dalam pengambilan keputusan. Teori prospek merupakan salah satu teori yang mencoba menjelaskan pengaruh framing. Teori prospek (*prospect theory*) menjelaskan terjadinya bias kognitif yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian dan berisiko.<sup>48</sup> Individu akan bersifat menghindari risiko atau menyukai risiko tergantung pada masalah yang dihadapi.

##### 5. *Emotion and Threat Perception*

Emosi memainkan peran yang dominan dalam pemikiran dan kaitannya dengan persepsi ancaman. Penelitian tentang emosi memiliki dampak yang signifikan terhadap analisis berbagai isu global: teori pencegahan, sinyal, pembatasan nuklir, perang, dan teror. Emosi mengambil peran yang pertama karena bersifat otomatis dan cepat, yang beroperasi di bawah ambang kesadaran, dan memainkan peran yang dominan dalam membentuk persepsi dan perilaku. Emosi membawa informasi kepada orang-orang tentang proses bawah sadar mereka yang kemudian menjadi pikiran dan perasaan sadar dan mempengaruhi persepsi dan keyakinan mereka.<sup>49</sup>

Ada beberapa faktor yang berkenaan dengan emosi yang meningkatkan persepsi ancaman, Pertama, ketakutan merupakan faktor emosi yang dapat meningkatkan persepsi ancaman. Persepsi ancaman tetap tinggi meskipun tidak ada serangan besar namun hal tersebut masih bagian dari fokus publik dan politik. Kedua, penghinaan dan kredibilitas, adanya rasa khawatir terkait reputasi individu,

---

<sup>48</sup> Tahneman dan k

<sup>49</sup> Janice Gross Stein, Threat perception in International Relations, (2013): 25

ancaman yang dianggap memalukan oleh individu. Adanya keyakinan emosional yang dipegang oleh penerima yang dituju. Pemimpin khawatir tentang kredibilitas terkait persepsi orang lain dalam hal mengatasi ancaman. Penanganan masalah pencari suaka menjadi isu yang sensitif juga dikaitkan dengan dengan isu kepemimpinan.

#### 6. *Emotion and Collective Appraisal*

Ancaman dan penghinaan yang tertuju pada suatu negara memicu emosi masing-masing individu, salah satunya adalah ketakutan. Ketakutan adalah keadaan emosional dan merupakan salah satu indikator pesimisme tentang masa depan. Sebuah integrasi psikologi yang dimasukkan dalam kajian teori hubungan internasional, dan bersandingan dengan teori rasional.<sup>50</sup> Ketakutan dan Emosi individu-individu ini pada akhirnya bermuara pada emosi yang bersifat kolektif. Hal ini dapat terjadi, atau bertambah, dikarenakan pernyataan atau sikap pemimpin politik, diskusi-diskusi atau berupa pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh dan pengamat politik yang kerap didengar publik di media massa, serta didukung oleh praktik atau kebijakan yang merupakan reaksi dari persepsi ancaman oleh pemimpin politik. Emosi individu ini menjadi emosi yang bersifat nasional, atau emosi sebuah bangsa yang dipicu dan berkembang atas dasar penilaian kolektif dengan identitas sosial yang sama.

Konsep persepsi ancaman ini akan menjelaskan apa saja yang mempengaruhi persepsi ancaman PM Tony Abbott dalam pembuatan kebijakan luar negerinya

---

<sup>50</sup> Janice Gross Stein, *Threat perception in International Relations*, (2013): 38

melalui kebijakan *Operation Sovereign Borders*. Persepsi ancaman inilah yang akan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat oleh PM Tony Abbott.

## **1.8 Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian hubungan internasional merupakan sebuah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan penulis sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan tentang sebuah fenomena dalam hubungan Internasional.<sup>51</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif, menurut Strauss dan Corbin merupakan suatu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>52</sup> Dengan kata lain, tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena melalui pengungkapan fakta beserta data-data secara sistematis, faktual dan juga akurat.

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha untuk membangun realitas dan memahami realitas tersebut dengan memperhatikan proses peristiwa dan intensitas.<sup>53</sup> Hal ini bertujuan untuk mendapatkan analisa yang lebih tajam dengan didasari fakta-fakta dan dinamika yang telah dipublikasikan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian analitis deskriptif. Penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif terkait isu yang

---

<sup>51</sup> Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi", pustaka LP3S. Jakarta.1994

<sup>52</sup> Pamela Maykut dan Richard Morehous, "Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide" dalam Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional", Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2016): 18-20

<sup>53</sup> Gumilar Ruslinawa Soemantri. "Memahami metode kualitatif" Journal Social Humaniora, Vol 9: (2005): 58.

dikaji melalui ucapan maupun perilaku seorang pembuat kebijakan. Penulis memilih penelitian jenis ini agar penulis mampu menjelaskan serta menggambarkan secara gamblang mengenai pengaruh persepsi ancaman Tony Abbott dalam penetapan kebijakan *Operation Sovereign Border* terkait isu pengungsi di Australia.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba memberikan batasan yaitu pada tahun 2013-2015. Hal ini disebabkan karena tahun 2013 inilah kebijakan *Operation Sovereign Border* dikeluarkan dalam menangani isu terkait pengungsi di Australia. Kebijakan OSB menunjukkan bahwa selama dua tahun masa pemerintahan PM Abbott September 2013-September 2015.

### **1.8.3 Unit dan Level Analisis**

Adapun unit analisis dalam penelitian adalah objek atau unit yang perilakunya akan dideskripsikan dan diramalkan.<sup>54</sup> Unit analisis disebut juga dengan variabel dependen. Penelitian ini mengadopsi individu sebagai unit analisa. Individu dipilih untuk dianalisis karena dalam proses pembuatan keputusan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari posisi strategis dan otoritas yang menyertai individu seperti presiden atau perdana menteri.<sup>55</sup> Unit analisis dalam penelitian adalah persepsi Perdana Menteri Tony Abbott.

Sedangkan unit yang berdampak terhadap unit analisis yang hendak diamati disebut sebagai unit eksplanasi atau disebut juga dengan variabel independen.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Masoed, "Studi Hubungan Internasional...", 36

<sup>55</sup> Janice Gross Stein. *Foreign Policy Decision making; Rational, Psychological, and Neurological Model* dikutip dalam buku Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dumne. *Foreign Policy Theories: Actor & Cases* (Oxford University Press, 2008): 113

<sup>56</sup> Masoed, "Studi Hubungan Internasional...", 36

Variabel independen sangat penting karena variabel inilah yang dapat menjelaskan unit analisis yang perilakunya hendak diamati, dideskripsikan atau diramalkan. Unit eksplanasi penelitian ini adalah penetapan kebijakan *Operation Sovereign Border* .

Kebijakan *Operation Sovereign Border* dapat dikategorikan sebagai unit negara-bangsa, sedangkan Tony Abbott dikategorikan sebagai unit terkecil dalam hubungan internasional, yakni individu. Tingkat atau level analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian.<sup>57</sup> Lebih lanjut, level analisis dalam penelitian ini tentunya adalah level individu. Permasalahan yang disoroti adalah keputusan Abbott dalam menetapkan *Operation Sovereign Border* merupakan antipoda terhadap prinsip aktor lain yang memiliki preferensi agar Australia seharusnya menerima pengungsi dan pencari suaka. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana persepsi individu Tony Abbott dapat berdampak terhadap pembentukan *Operation Sovereign Border* di negaranya.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari sumber-sumber literatur akademik seperti buku, jurnal, majalah, berita dan website. Sumber yang dijadikan bahan rujukan utama bagi penulis adalah data yang terdapat dalam situs-situs resmi yang menyediakan informasi berupa data-data seperti data tentang pengungsi dan pencari suaka dalam Parliamentary of Australia, di mana website ini menyediakan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan imigran di Australia. Penulis juga memakai situs-

---

<sup>57</sup> Masoed, "Studi Hubungan Internasional...", 41

situs resmi dalam melakukan penelitian ini di antaranya : situs resmi pemerintah Australia khusus tentang migran (Government of Australia ), situs resmi Tony Abbott (The Hon Tony Abbott) maupun situs resmi perdana menteri Australia terkait segala pidato maupun pernyataan yang dikeluarkan oleh perdana menteri yang menjabat pada masanya. Selain sumber utama tersebut, penulis juga menggunakan sumber sumber terkait lainnya seperti artikel jurnal, berita daring, dan laman situs resmi, dan penelitian-penelitian terdahulu terkait kasus penelitian.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

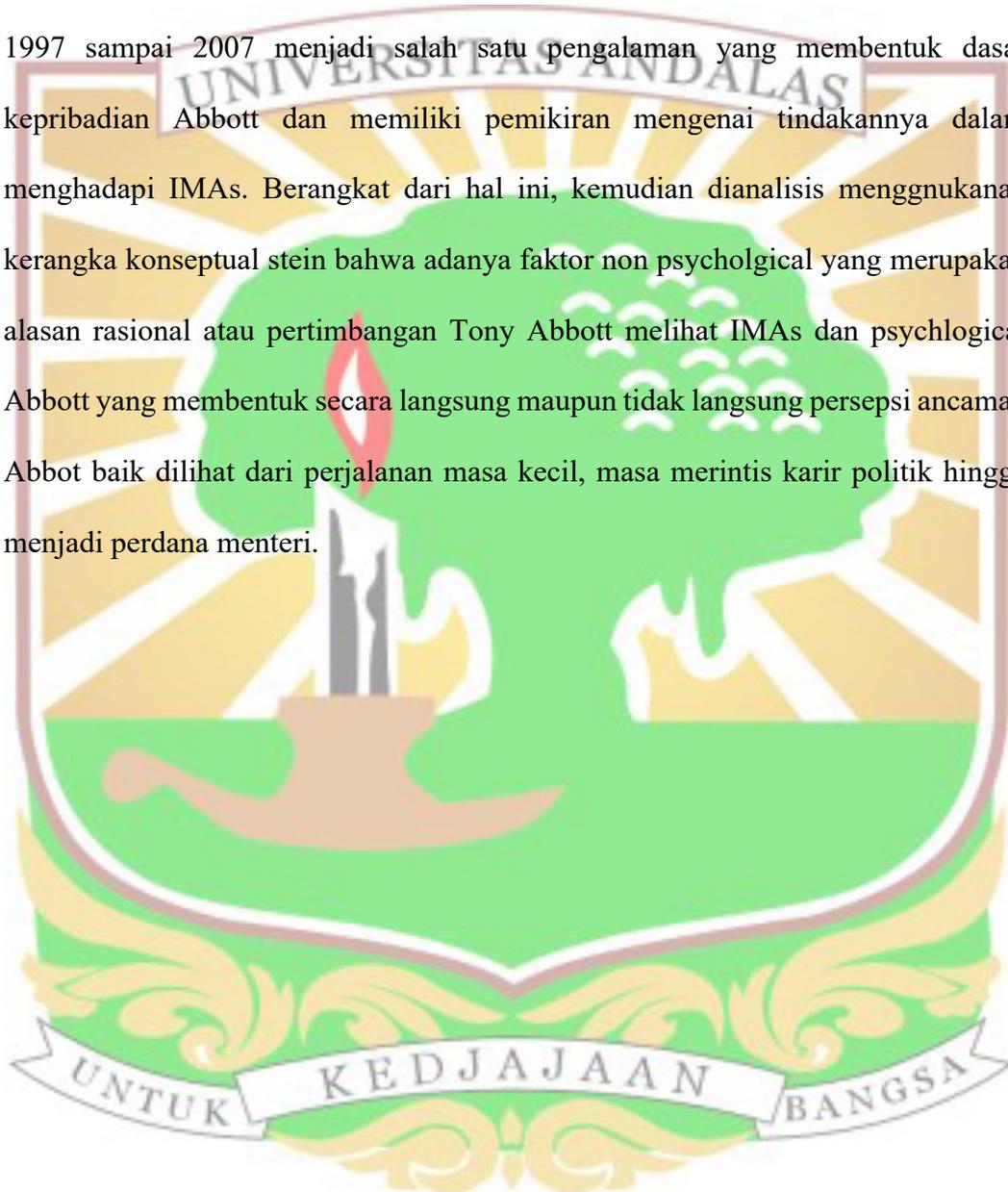
Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan data guna memperoleh suatu pola atau bentuk-bentuk keteraturan.<sup>58</sup> Data-data penelitian yang telah dihimpun peneliti kemudian diinterpretasikan oleh peneliti guna menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Interpretasi data penelitian berarti menjelaskan pola yang belum terpecahkan melalui analisis data, memberikan gambaran latar belakang pengetahuan maupun pengalaman untuk menjawab pertanyaan dengan menghubungkannya dengan data-data ilmiah.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, analisis akan dititik beratkan dengan melihat dan membahas persepsi ancaman Tony Abbott dalam menetapkan *Operation Sovereign Border*. Analisis data yang akan dilakukan peneliti pertama, data-data yang berkaitan dengan kebijakan *Operation Sovereign Border* terkumpul, menjadi sebuah kejadian yang berurutan dan dideskripsikan. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan persepsi ancaman dan kebijakan luar negeri.

---

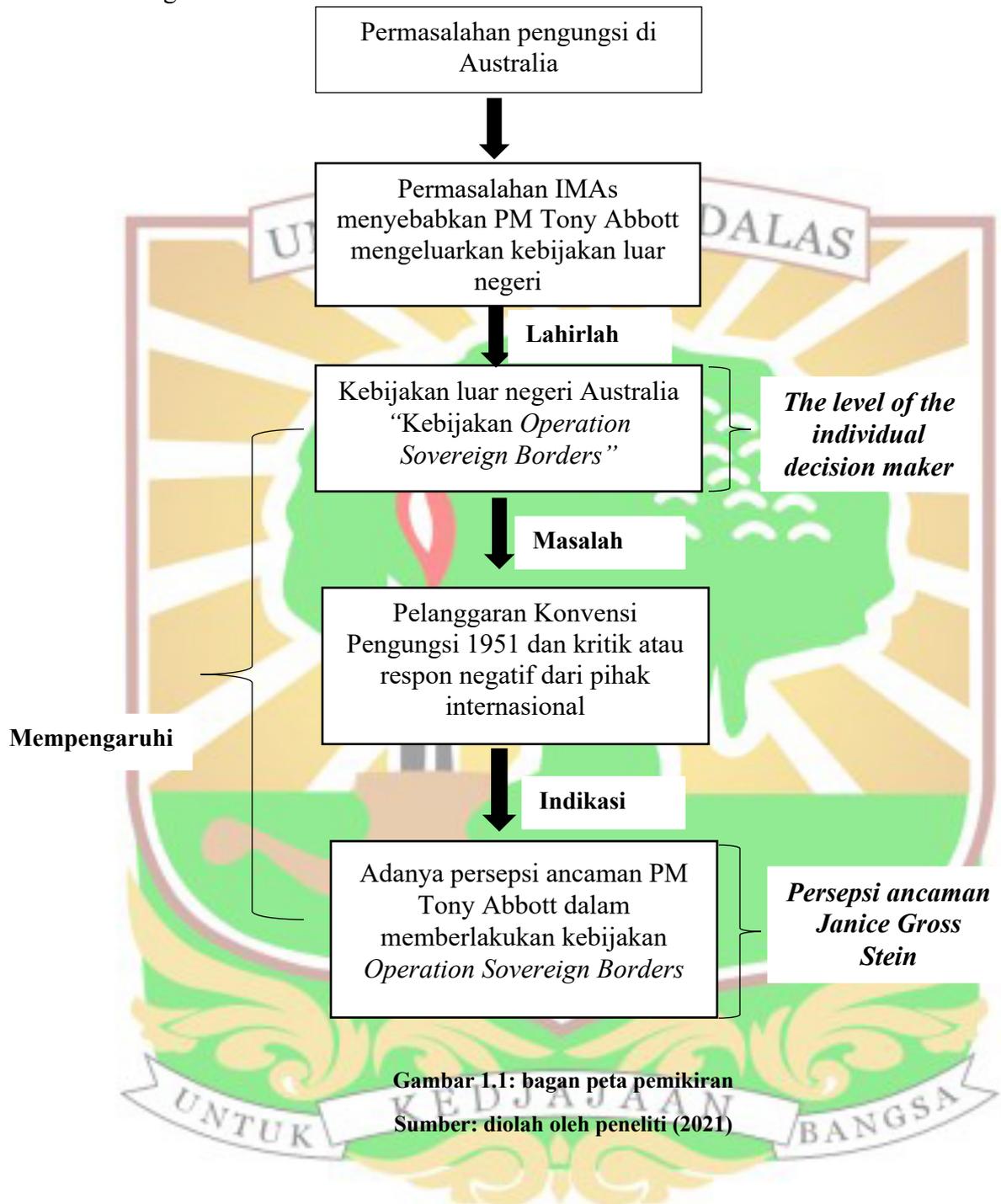
<sup>58</sup> Lexy J. Meoleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung : Remaja Karya, 1989): 112-113.

<sup>59</sup> Vijayamohan Pillai N, "Data Analysis and Interpretation" (Conference Paper), September 2015.

Secara singkat, penulis menganalisis bahwa pengalaman Abbott sebagai jurnalis dan penasihat memberikan dampak pada pola pikir Abbott dan membentuk sikap yang tegas dari permasalahan IMAs. Kemudian semakin diperkuat dengan perjalanan hidupnya sebagai menteri pada masa pemerintahan Howard dari tahun 1997 sampai 2007 menjadi salah satu pengalaman yang membentuk dasar kepribadian Abbott dan memiliki pemikiran mengenai tindakannya dalam menghadapi IMAs. Berangkat dari hal ini, kemudian dianalisis menggunakan kerangka konseptual Stein bahwa adanya faktor non psychological yang merupakan alasan rasional atau pertimbangan Tony Abbott melihat IMAs dan psychological Abbott yang membentuk secara langsung maupun tidak langsung persepsi ancaman Abbott baik dilihat dari perjalanan masa kecil, masa merintis karir politik hingga menjadi perdana menteri.



Dalam memudahkan proses analisis maka penelitian menggunakan peta pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1: bagan peta pemikiran  
Sumber: diolah oleh peneliti (2021)

## 1.9 Sistematika Penulisan

### **BAB I           Pendahuluan**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan terhadap tulisan ilmiah atau penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan pembanding, kerangka konseptual sebagai alat analisis penelitian, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, batasan masalah, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan analisis data serta sistematika penulisan.

### **BAB II           Kebijakan *Operation Sovereign Border* Terkait Isu Pengungsi di Australia**

Bab ini akan menjelaskan isu pengungsi yang di Australia tahun 2013-2015, kebijakan Australia terhadap pengungsi masa pemerintahan PM John Howard hingga PM Tony Abbott, serta kondisi domestik Australia pada masa krisis pengungsi dan penjelasan terkait kebijakan *Operation Sovereign Border*.

### **BAB III          Perjalanan Hidup Tony Abbott**

Bab ini berisi penjelasan terkait kisah perjalanan hidup Tony Abbott sebelum ia menjabat sebagai perdana menteri Australia. Dimulai dari masa kecil dan kehidupan

keluarganya, perjalanan pendidikan, masa ia mulai terjun ke dunia politik hingga terpilih sebagai perdana menteri.

**BAB IV Analisis Persepsi Ancaman terkait Pemerintahan PM Tony Abbott dalam Perumusan dan Penetapan *Operation Sovereign Border***

Bab ini akan menjelaskan analisis persepsi ancaman Tony Abbott dengan menggunakan kerangka pemikiran hubungan persepsi ancaman dengan proses pengambilan keputusan sehingga ia memutuskan untuk menetapkan *Operation Sovereign Border*.

**BAB V Penutup**

Merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan, saran terkait penelitian dan daftar kepustakaan.

